

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak pemerintah desa dan tokoh masyarakat, serta melakukan dokumentasi untuk mendukung data hasil wawancara, maka tata kelola pemerintahan Desa Logede sebagai desa yang ditunjuk oleh Pemkab Kebumen sebagai *pioneer* antikorupsi sejatinya sudah menunjukkan adanya praktik yang sesuai dengan tujuan adanya desa antikorupsi, walaupun memang ada beberapa hal belum nampak dalam penyelenggaraan tata kelola mereka. Adapun penggunaan konsep *good village governance* dalam penelitian ini digunakan sebagai konsep untuk membandingkan atau memvalidasi adanya klaim dari Pemkab utamanya dari Dinas PMD Kabupaten Kebumen yang secara garis besar menyatakan alasan dibalik penunjukan ini adalah atas dasar tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hasil temuan lapangan praktik yang sudah nampak atau sudah sesuai dengan konsep *good village governance* diantaranya yaitu keterlibatan aktif masyarakat dalam tata kelola, upaya untuk memberikan akses yang sama bagi masyarakat, pelayanan yang tanggap, pengambilan keputusan yang berorientasi pada kepentingan bersama, adanya upaya untuk menegakan hukum, menciptakan efektivitas dan efisiensi pemerintahan. praktik yang sudah terlihat ini tentu tidak terlepas dari berbagai upaya yang bukan hanya dilakukan pemerintah sebagai ujung tombak pembangunan, namun juga masyarakat yang juga ambil bagian didalamnya.

Dilain sisi, terlepas dari sudah banyaknya praktik yang terlihat, masih terdapat beberapa kendala dalam mewujudkan tata kelola yang baik, diantaranya yaitu belum adanya program yang menjamin adanya inklusivitas bagi penyandang disabilitas, keterbatasan penguasaan teknologi dan juga kurang optimalnya pendistribusian informasi terkait penggunaan anggaran serta program program yang ada di desa utamanya pada penggunaan *website* desa.

Tata kelola pemerintahan Desa Logede, meskipun belum sepenuhnya optimal, telah menunjukkan upaya tata kelola pemerintahan yang mendukung predikatnya sebagai desa antikorupsi melalui penerapan prinsip *good village governance*. Namun, perlu diakui bahwa masih ada beberapa aspek yang belum sepenuhnya terlihat dalam penyelenggaraan tata kelola, sehingga potensi untuk terus menyempurnakan sistem pemerintahan yang ada masih sangat terbuka.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka peneliti merekomendasikan beberapa saran baik untuk pemerintah Logede maupun penelitian selanjutnya, diantaranya yaitu:

1. Pemerintah Desa Logede harus berkomitmen meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa dengan memperbaiki kualitas laporan pertanggungjawaban yang diunggah pada *website* desa agar masyarakat dapat memantau penggunaan dana dan program yang dijalankan secara terbuka. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan, meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan pembangunan desa berjalan sesuai kebutuhan warga.

2. Optimalisasi peran BPD dalam meningkatkan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa utamanya dalam pengelolaan website, yakni dalam memantau kelengkapan dan kualitas dokumen yang diunggah. Hal ini mengingat masih adanya kesalahan yang sama, yang mana berasal dari sebuah kelalaian perangkat desa dalam menciptakan laporan pertanggungjawaban yang seharusnya mampu didistribusikan dengan baik oleh pemerintah desa dalam website desa.
3. Menyusun program pemberdayaan atau melibatkan penyandang disabilitas pada kegiatan kegiatan yang dapat memberikan motivasi dan keterampilan , sehingga mereka memiliki bekal keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan hidup mereka. Hal ini bisa dilakukan dengan mengoptimalkan peran dari kelembagaan desa seperti Wanita Melek Perencanaan agar dapat menggali aspirasi dari kelompok tersebut, baik keluarganya ataupun penyandang disabilitas itu sendiri.
4. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan studi di desa lain yang dapat memberikan perspektif berbeda mengenai implementasi prinsip tata kelola yang baik dalam upaya pencegahan korupsi. Dengan memilih desa lain, penelitian bisa memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut.